

KOMUNIKASI LINGKUNGAN PT INDONESIA POWER SURALAYA POWER GENERATION UNIT (PGU) CILEGON

R. Nugraha Dananjaya¹

Magister Administrasi Publik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ipah Ema Jumiati

Magister Administrasi Publik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Emmaumar@gmail.com

Ayuning Budianingsih

Magister Administrasi Publik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ayoekomara@gmail.com

Abstract

When implementing Environmental Impact Analysis (EIA) in the electricity sector, environmental management does not pay attention to the principles of sustainable development goals, namely social, economic and ecological. This leads to threats to sustainability when companies lose their image and remain on the path through the concept of profit. This raises concerns about environmental and social issues with political and economic factors, according to public perception. The purpose of this study is to investigate the implementation of EIA through sustainable development and to encourage efforts to implement sustainable development by implementing EIA at PT. Indonesia Power Suralaya Power Generation Unit (PGU) will create Cilegon City. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach that is analyzed using data analysis and SWOT analysis. The findings of this study are that EIA is used to overcome negative effects and develop positive effects that are the results and obligations of the PT. PGU industry, Cilegon City, trying to maintain the sustainability of its environmental functions, preventing and overcoming pollution and destruction. Implementing sustainable development at PT. PGU is good, but still needs to be improved, but with harmony and proper support from the government (good governance).

Keywords: Image, EIA, good governance

Abstrak

Saat menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di sektor listrik, manajemen lingkungan tidak memperhatikan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi dan ekologis. Ini mengarah pada ancaman terhadap keberlanjutan ketika perusahaan kehilangan citra mereka dan tetap di jalan melalui konsep laba. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang masalah lingkungan dan sosial dengan faktor-faktor politik dan ekonomi, menurut persepsi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menyelidiki implementasi Amdal melalui pembangunan berkelanjutan dan untuk mendorong upaya untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dengan mengimplementasikan Amdal pada PT. Indonesia Power Suralaya Power Generation Unit (PGU) akan menciptakan Kota Cilegon. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis menggunakan analisis data dan analisis SWOT. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Amdal digunakan untuk mengatasi efek negatif dan mengembangkan efek positif yang merupakan hasil dan wajib industri PT. PGU, Kota Cilegon, berusaha mempertahankan keberlanjutan fungsi lingkungannya, mencegah dan mengatasi polusi dan penghancuran. Menerapkan pembangunan berkelanjutan di PT. PGU itu baik, tetapi masih perlu ditingkatkan, tetapi dengan harmoni dan dukungan yang tepat dari pemerintah (good governance).

Kata kunci : Citra, Amdal, good governance

PENDAHULUAN

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin (Siregar & Utomo, 2019).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 11, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau Kegiatan. Salah satu sektor industri yang perlu menjadi perhatian adalah ketenagalistrikan, salah satunya adalah milih PT. Indonesia Power Suralaya di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Keberadaan entitas pada suatu lingkungan dapat menyebabkan penurunan kualitas ekonomi, karena aktivitas - aktivitas operasional yang dijalankan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Isu eksternalitas negatif atau dis-ekonomi menunjukkan keterbatasan paradigma Single "P" yaitu profit, hal ini mengakibatkan usaha yang mulanya di bangun dengan dasar kepedulian pada keseluruhan paradigma keberlanjutan, kemudian hanya peduli pada satu sisi paradigma dengan mengabaikan paradigma lainnya (ADB, 2020). Perusahaan biasanya akan cenderung mementingkan citra di masyarakat dengan hanya fokus pada profit. Tetapi seiring berjalannya waktu, profit bukan satu - satunya hal yang diperhatikan dalam menentukan kualitas perusahaan.

Dalam implementasi Amdal pada perusahaan-perusahaan masih banyak terdapat pengelolaan lingkungan tidak memperhatikan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan akan kehilangan citra dan keberlanjutannya terancam apabila tetap bertahan pada konsep profit seiring dengan kesadaran masyarakat yang meningkat atas kepedulian terhadap lingkungan dan sosial yang didalamnya terhadap unsur politik serta ekonomi.

Beberapa fenomena yang timbul atas kegiatan operasi perusahaan, membawa pada upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi

serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan yang diwujudkan melalui AMDAL tersebut.. Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilihat dari segi komunikasi lingkungan dan arah kebijakan good governance supaya tercipta citra yang positif di mata masyarakat. Komunikasi Lingkungan Komunikasi pembangunan telah berkembang sejalan dengan gerakan-gerakan lingkungan yang menuntut adanya aspek keberlanjutan (Floor, 2004). Komunikasi lingkungan mulai muncul di awal tahun 1960-an saat Rachel Carson mengemukakan bahaya pestisida terhadap kesehatan manusia dan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga komunikasi lingkungan selalu disejajarkan dan dikaitkan dengan komunikasi kesehatan (Willoughby & Smith, 2016). Burgess & Harrison (1998) berpendapat wacana mengenai lingkungan antara tahun 80 hingga 90an, berkembang dari yang semula tidak terlalu banyak dibahas menjadi aspek yang diperhatikan dalam hal pengukuran keberlanjutannya.

Komunikasi lingkungan mencakup analisis komparatif dari proses sosial dan budaya dimana di dalamnya publik dapat memahami masalah-masalah lingkungan global, dan sejauh yang pemahaman tersebut diterjemahkan ke dalam perubahan praktek pada tingkat individu dan rumah tangga. Aspek keberlanjutan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa individu dan lembaga dapat dibujuk untuk menerima tanggung jawab terhadap munculnya masalah lingkungan dan mengubah praktik sehari-hari mereka demi meringankan dampak lingkungan di masa depan. Flor (2004) mendefinisikan komunikasi lingkungan sebagai sebuah pengaplikasian pendekatan komunikasi, prinsip, strategi dan teknik terhadap tata kelola dan perlindungan lingkungan.

Secara singkat komunikasi lingkungan merupakan pertukaran informasi lingkungan, pengetahuan dan bahkan kearifan yang berujung pada saling pengertian (mutual understanding) antara para pihak. Sementara Cox (2013) mendefinisikan komunikasi lingkungan sebagai sebuah studi tentang cara kita berkomunikasi tentang lingkungan, pengaruh dari komunikasi tersebut terhadap persepsi kita terhadap lingkungan, diri kita sendiri dan hubungan kita dengan lingkungan. Komunikasi lingkungan merupakan wahana atau alat pragmatis dan konstitusif untuk mempelajari dan mengerti tentang lingkungan termasuk hubungan kita terhadap lingkungan.

Komunikasi lingkungan merupakan media simbolik yang digunakan untuk mengkonstruksi masalah lingkungan dan untuk menegosiasikan respon masyarakat yang

berbeda. Hubungan antara wacana, komunikasi dan pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan oleh Cox (2013) yaitu: 1. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya merupakan aksi simbolis. Keyakinan, sikap dan perilaku kita terhadap isu lingkungan sepenuhnya dimediasi oleh komunikasi. Dengan demikian ruang publik kemudian muncul sebagai sebuah ruang diskursif untuk berkomunikasi tentang lingkungan.

Kolaborasi merupakan bentuk komunikasi konstruktif dan terbuka dimana pihak yang terlibat (partisipan) bekerja sama dalam penyelesaian masalah lingkungan dan resolusi konflik. Kolaborasi diwujudkan dalam dialog yang fokus pada tujuan jangka panjang, proses pembelajaran dan pembagian kekuasaan (power sharing). Dalam beberapa kasus, partisipan akan berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus sehingga diskusi dan perdebatan tersebut tidak akan selesai hingga masing-masing pihak mengemukakan sikapnya yang berbeda-beda dan menemukan kesamaan. Pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan istilah kunci (key term) yang terkait erat dengan kolaborasi dimana dalam hal ini masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah perselisihan (dispute) memiliki kepentingan yang jelas (a stake) dalam pencapaian sebuah hasil (outcome).

Sebuah kolaborasi yang sukses dimulai dengan duduknya para pemangku kepentingan yang terlibat dalam satu meja yang berarti bahwa para pemangku kepentingan bersedia untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lie dan Servaes menambahkan bahwa subdisiplin komunikasi lingkungan pada umumnya didominasi oleh isu perubahan iklim, yang telah menjadi agenda utama pada beberapa tahun terakhir ini. Berbeda dengan penyuluhan pertanian, komunikasi lingkungan, terutama komunikasi perubahan iklim, lebih fokus pada keterlibatan dan opini publik serta risiko dari perubahan iklim dimaksud.

Terkait dengan aspek pembangunan, dijelaskan bahwa masyarakat yang masuk dalam golongan miskin merupakan pihak yang paling rentan dan paling merasakan dampak lingkungan seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber energi, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan cuaca ekstrim.

Teori Pemangku Kepentingan Teori mengenai pemangku kepentingan secara substansial telah berkembang sejak R. Edward Freeman menulis tentang konsep pemangku kepentingan pada tahun 1984. Definisi klasik Freeman mengenai pemangku kepentingan

yaitu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Friedman & Miles, 2006). Sedangkan perkembangan konsep pemangku kepentingan dimaksud adalah meluasnya konsep pemangku kepentingan yang sebelumnya secara eksklusif fokus pada strategi dan moralitas perusahaan menjadi terbuka bagi masuknya berbagai jenis organisasi sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Namun demikian pendekatan yang berbeda dikemukakan oleh Eden & Ackerman (1998 dalam Orr, 2014) yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan untuk merespon, bernegosiasi dan mengubah masa depan strategis suatu organisasi. Oleh sebab itu, kelompok marjinal yang tidak memiliki sumber daya untuk mempengaruhi suatu pembuatan keputusan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari pemangku kepentingan.

Orr menyatakan setidaknya ada tiga syarat utama suatu kelompok dapat diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan atau tidak, yaitu jika kelompok tersebut memiliki (1) kekuatan untuk mempengaruhi; (2) legitimasi hubungan dengan perusahaan, dan (3) urgensi terhadap tuntutan dari pemangku kepentingan. Sejalan dengan pendekatan pertama yang menempatkan pemangku kepentingan sebagai sesuatu yang inklusif, pada umumnya tren dalam literatur konflik lingkungan menunjukkan adanya upaya untuk menerima sejumlah besar individu dan organisasi sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Menurut pendekatan ini, kerjasama antar pemangku kepentingan dipandang sebagai sebuah pusat untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan. Orr secara khusus menghubungkan teori pemangku kepentingan dengan penyusunan kebijakan lingkungan.

Penyusunan kebijakan lingkungan merupakan sebuah tahapan yang kompleks dimana pemerintah berkewajiban untuk mengambil keputusan-keputusan yang dituangkan dalam bentuk payung hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis merujuk pada Creswell (2013: 11) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komunikasi lingkungan. Informan ditentukan dengan purposive sampling, merujuk pada buku (Afrizal, 2014:140-141) yang mengatakan langkah ini memberikan kriteria yang sudah ditentukan yaitu Dinas Lingkungan hidup Provinsi Banten. Menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:134-135), yaitu melakukan reduksi data yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang didapatkan (Emzir, 2010: 129). Selanjutnya pengajian data dan penarikan kesimpulan yang didalamnya berisi rangkuman dari setiap pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan bahwa DLH sudah melakukan berbagai upaya dalam komunikasi untuk menjelaskan mengenai dampak lingkungan, namun pemerintah sendiri masih belum mampu memberikan aturan dan sanksi tegas pada pada pelanggar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kawasan. Peneliti menggunakan analisis SWOT, Analisis SWOT dapat digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten melalui implementasi AMDAL. Analisis ini akan melibatkan pemasangan faktor-faktor internal dan eksternal. Prinsip analisis ini mencakup evaluasi *strength* (S), *weakness* (W), *opportunity* (O), dan *threats* (T) (Rangkuti, 2017).

Adapun matriks dari analisis SWOT memberikan gambaran bagaimana analisis akan dilakukan melalui pengelaborasi antara S - O, S - T, W - O, dan W - T. S - O adalah strategi yang disusun dengan menggambarkan kekuatan dan peluang sehingga strategi yang digunakan adalah memaksimalkan semua kekuatan untuk merebut peluang, S - T adalah strategi yang disusun dengan menggunakan semua kekuatan untuk dapat mengatasi ancaman yang ada. W - O adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk kemudian memanfaatkan peluang yang ada. W - T adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman yang ada.

Tabel. Matriks SWOT Pemasangan Faktor

IFA / EFA	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
Opportunities (O)	Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T)	Strategi ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

(Sumber: Gurel, 2017, telah diolah kembali)

HASIL DAN DISKUSI

Faktor internal khususnya faktor kekuatan yang memengaruhi rekomendasi upaya implementasi pembangunan berkelanjutan menggunakan instrumen AMDAL pada PT. Indonesia Power Suralaya adalah sebagai berikut:

- PT. Indonesia Power Suralaya adalah bagian dari PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga terdapat dukungan baik secara teknis, operasional, administratif, dan finansial dari negara;
- Indonesia memiliki sumber daya batu bara yang besar sebagai bahan baku sehingga menjamin keberlanjutan usaha;
- Produk berupa energi listrik akan habis dikonsumsi sehingga memberikan pendapatan yang tinggi;
- Harga bahan baku berupa batu bara yang terjangkau, sehingga perusahaan lebih *profitable* dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan baku lainnya.

Masih dari faktor internal khususnya faktor kelemahan yang memengaruhi rekomendasi upaya implementasi pembangunan berkelanjutan menggunakan instrumen AMDAL pada PT. Indonesia Power Suralaya adalah sebagai berikut:

- Menghasilkan emisi karbon yang mengancam perubahan iklim;
- Ketergantungan terhadap bahan baku batu bara yang merupakan energi tidak terbarukan;
- Masih menggunakan teknologi yang diadopsi dari luar negeri dan belum dioptimalisasi;
- Tenaga kerja dalam negeri yang bersaing dengan tenaga kerja asing karena adopsi teknologi yang diambil dari luar negeri.

Faktor eksternal khususnya faktor peluang yang memengaruhi rekomendasi upaya implementasi pembangunan berkelanjutan menggunakan instrumen AMDAL pada PT. Indonesia Power Suralaya adalah sebagai berikut:

- Kebijakan konversi dan transisi energi dari bahan bakar fosil menjadi EBT;
- Investasi terhadap EBT yang terus meningkat;
- Kampanye lingkungan yang semakin tinggi baik melalui konferensi internasional maupun sosial media;
- Semakin tingginya minat masyarakat kepada produk ramah lingkungan.

Masih dari faktor eksternal khususnya faktor ancaman yang memengaruhi rekomendasi upaya implementasi pembangunan berkelanjutan menggunakan instrumen AMDAL pada PT. Indonesia Power Suralaya adalah sebagai berikut:

- Adanya kebijakan peningkatan produksi listrik nasional;
- Terdapat *Power Purchase Agreement* (PPA) terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga tahun 2050.
- Semakin tingginya kebutuhan listrik nasional sehingga mendorong perusahaan untuk menaikkan kapasitas dan mempengaruhi kenaikan emisi serta limbah;
- Persaingan bahan baku dengan negara – negara besar yang kembali menggunakan pembangkit berbahan baku batu bara.

Pembobotan dan ranking dari masing - masing kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan untuk menilai skor kecenderungan penilaian analisis SWOT. Hasil dan transformasi pada diagram kartesius dapat digunakan sebagai rekomendasi implementasi pembangunan berkelanjutan melalui instrumen AMDAL. Berdasarkan diagram kartesius analisis SWOT, didapatkan hasil bahwa strategi yang sesuai dengan kondisi eksternal dan

internal menurut informan adalah untuk mendukung strategi pembenahan atau turn around dengan menggunakan kelemahan dan peluang.

Tabel Matriks Rekomendasi W – O dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Implementasi AMDAL di PT. Indonesia Power Suralaya

<p>Faktor Internal</p>	<p>Kelemahan/<i>Weakness</i> (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan emisi karbon yang mengancam perubahan iklim; • Ketergantungan terhadap bahan baku batu bara yang merupakan energi tidak terbarukan; • Masih menggunakan teknologi yang diadopsi dari luar negeri dan belum dioptimalisasi; • Tenaga kerja dalam negeri yang bersaing dengan tenaga kerja asing karena adopsi teknologi yang diambil dari luar negeri. 	<p>Rekomendasi W – O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon melalui transisi energi terbarukan dengan kampanye perubahan iklim (<i>climate change</i>); • Meningkatkan investasi pada EBT dan mengurangi ketergantungan pada batu bara, salah satunya dengan kebijakan bahan bakar campuran biomassa; • Meningkatkan program kepedulian lingkungan dan memaksimalkan pemakaian produk dalam negeri;
<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang/<i>Opportunity</i> (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan konversi dan transisi energi dari bahan bakar fosil menjadi EBT; • Investasi terhadap EBT yang terus meningkat; • Kampanye lingkungan yang semakin tinggi baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan target TKDN 100% dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pro lingkungan.

	melalui konferensi internasional maupun sosial media; • Semakin tingginya minat masyarakat kepada produk ramah lingkungan.	
--	---	--

(Sumber: Peneliti, 2023)

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dibutuhkan suatu kebijakan publik yang mampu membawahi dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan operasional ketenagalistrikan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah saat ini sudah mencanangkan *retirement* (pemensiunan) batu bara bersamaan dengan kebijakan direktur PLN yang melarang batu bara untuk menjadi andalan pembangkit Indonesia di masa depan.

Hal ini kemudian menuntut, diperlukannya aturan yang jelas agar PT. Indonesia Power Suralaya yang menjadi bagian dari perusahaan listrik dapat beradaptasi dan menyesuaikan program yang sudah ada. Kebijakan yang disebut *phase out* tersebut nantinya akan menggantikan PLTU batu bara dengan EBT secara keseluruhan di tahun 2050. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat saat ini dominasi PLTU masih menjadi andalan pembangkit listrik di Indonesia. Namun demikian, sebelum mengarah kesana, alangkah lebih baik apabila dalam masa transisi, terdapat kebijakan yang lebih kuat mengatur terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 juga menyebutkan penyediaan tenaga listrik PLN hingga tahun 2029 masih akan didominasi oleh pembangkit bahan bakar fosil, terutama batu bara. Kebijakan dari PLN terkait hal ini adalah PL hanya akan menggunakan boiler supercritical, ultrasupercritical untuk PLTU batu bara yang akan dikembangkan. Berdasarkan peta jalan yang direncanakan dan diproyeksikan oleh PLN selaku perusahaan listrik di Indonesia, tahun 2021 hingga 2030 difokuskan pada pemanfaatan EBT secara signifikan. Optimisme ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada lingkungan dan semakin mempromosikan keberlanjutan.

Meskipun demikian, ketercapaian yang belum optimal membutuhkan skenario ataupun alternatif energi untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari kebijakan energi nasional. Sehingga target dan capaian yang sudah dicanangkan dan direncanakan dapat diminimalisir kegagalannya. Kebijakan dari pemerintah juga perlu dilakukan evaluasi dan penetrasi dengan perusahaan pembangkit listrik, khususnya pada perusahaan swasta yang tidak bekerja secara langsung dibawah pemerintah.

PT. Indonesia Power Suralaya berada dibawah pengawasan langsung pemerintah, oleh karenanya hasil capaian yang baik, meskipun perlu ditingkatkan, menjadi target yang realistis dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi misi pemerintah dan perusahaan pembangkit. Misalnya terkait dengan rencana pemensiunan PLTU batu bara 2050 dimana sosialisasi terkait arah PLTU setelah berhenti beroperasi belum jelas kebijakannya. Analisis perusahaan energi berikut kebijakan yang menaunginya tidak hanya ditinjau dari satu sisi perusahaan maupun pembuat kebijakan. Integrasi dan koordinasi keduanya diperlukan untuk optimalisasi perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan dan dapat disepakati bersama dengan komitmen yang tegas. Analisis faktor internal dan eksternal dalam SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini, sedikit banyak akan mempengaruhi keberlanjutan melalui implementasi AMDAL dengan poin utama pada kebijakan, sosialisasi, dan teknologi. Kebijakan, utamanya akan menjadi landasan bersama dan menjadi dasar acuan pembangunan dan pengembangan energi. Kebijakan menjadi motor koordinasi antar kementerian dan lembaga (termasuk pemerintah daerah) untuk menyatukan langkah bersama dalam program dan proyek energi dan pembangkitan listrik menuju keberlanjutan.

KESIMPULAN

AMDAL telah digunakan untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang merupakan konsekuensi dan kewajiban PT. Indonesia Power Suralaya untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan. Implementasi pembangunan berkelanjutan di PT. Indonesia Power Suralaya, meskipun telah baik namun masih tetap perlu ditingkatkan, hal tersebut perlu diiringi dengan keselarasan dan dukungan pemerintah yang baik (*good governance*).

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen AMDAL dapat digunakan strategi *turn around* dengan menggunakan kelemahan dan peluang dari analisis SWOT. Ketercapaian yang belum optimal membutuhkan skenario ataupun alternatif energi berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari kebijakan energi nasional. Sehingga target dan capaian yang sudah dicanangkan dan direncanakan dapat diminimalisir keagalannya.

REFERENSI

- ADB. (2020). Energy Sector Assessment, Strategy, and Road Map: Indonesia. In *Asia Development Bank* (Issue December).
- Adharani, Y. (2017). Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), 61–83. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a4>
- Afshari, H., Agnihotri, S., Searcy, C., & Jaber, M. Y. (2022). Social Sustainability Indicators : A Comprehensive Review with Application in the Energy Sector. *Sustainable Production and Consumption*. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.02.018>.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Axon, S., & James, D. (2017). ScienceDirect The UN Sustainable Development Goals : How can sustainable chemistry contribute ? A view from the chemical industry. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, 13, 140–145. <https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2018.04.010>
- Ayers, J. C. (2017). *Sustainability: An Environmental Science Perspective*. CRC Press.
- Bielecki, A., Ernst, S., Skrodzka, W., & Wojnicki, I. (2020). The externalities of energy production in the context of development of clean energy generation. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(11), 11506–11530. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-07625-7>
- Bradley, P. (2022). An exploration of institutional approaches in pursuing sustainable development. *Sustainable Production and Consumption*, 30, 623–639. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.12.010>.

- Cunningham, W., & Cunningham, M. (2021). *Environmental Science: A Global Concern* (15th Editi). McGraw Hill Companies.
- Dwijowijoto, N. R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Enger, E. D., & Smith, B. F. (2010). *Environmental science: a study of interrelationships*. McGraw Hill Companies.
- Grindle, Merilee. S. (1980). *Politics and Policy Implementation In The Third World*. Princeton University Press.
- Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 204. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5610>
- Hove, G., Rathaha, T., & Mugiya, P. (2020). The Impact of Human Activities on the Environment, Case of Mhondongori in Zvishavane, Zimbabwe. *Journal of Geoscience and Environment Protection*, 08(10), 330–349. <https://doi.org/10.4236/gep.2020.810021>
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika.
- Kabeyi, M. J. B., & Olanrewaju, O. A. (2020). Managing sustainability in electricity generation. *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 2020-Decem*, 530–536. <https://doi.org/10.1109/IEEM45057.2020.9309994>
- Klose, F., & Prudlo, J. (2013). Flexibilization - The New Paradigm in Power Generation. *Bcg.Perspectives*, 1. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/energy_environment_flexibilization_new_paradigm_in_power_generation/
- Lulufani, R., & Setyadharma, A. (2020). Dampak Ekonomi dan Lingkungan Keberadaan PLTU Tanjung Jati B Terhadap Masyarakat. *Indonesian Journal of Development Economics*, 3(3), 983–993.
- Margareta Hunter, H., Suidiana Mahendra, M., & Sila Dharma, I. G. B. (2017). Efektivitas Penerapan Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pembangkit Listrik Di Bali – Studi Kasus Pltd/G Pesanggaran. *ECOTROPIC : Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)*, 11(1), 62. <https://doi.org/10.24843/ejes.2017.v11.i01.p10>
- Meleong, L. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosda.

- Miller, T. G., & Spoolman, S. (2016). *Environmental Science* (15th Editi). Pacific Grove, CA
Cengage Learning : National Geographic Learning.
- Mclynty-Mills, Janet. *Planetary Passport: Re-presentation, Accountability and Re-
Generation*. Springer.
- Niemets, K., Kravchenko, K., Kandyba, Y., Kobylin, P., & Morar, C. (2021). Geography and
Sustainability World cities in terms of the sustainable development concept ☆.
Geography and Sustainability, 2(4), 304–311.
<https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.12.003>.
- Nugroho, D. R. (2008). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex
Media Komputindo.
- Olawumi, T. O., & Chan, D. W. M. (2018). A scientometric review of global research on
sustainability and sustainable development. *Journal of Cleaner Production*, 183, 231–
250. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.162>.
- Pahuluan, A., Soeprobowati, T. R., & Hadiyanto, H. (2017). Environmental carrying capacity
based on land balance for evaluation planning of spatial and regional in Solok regency,
West Sumatra. *Journal of Ecological Engineering*, 18(3), 22–30.
<https://doi.org/10.12911/22998993/69360>
- Pramanik, R. A., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Dampak perizinan pembangunan pltu
batang bagi kemajuan perekonomian masyarakat serta pada kerusakan lingkungan.
Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 17(2), 248–256.
[https://www.researchgate.net/publication/346677250_Dampak_perizinan_pembang
unan_PLTU_batang_bagi_kemajuan_perekonomian_masyarakat_serta_pada_kerusakan
_lingkungan](https://www.researchgate.net/publication/346677250_Dampak_perizinan_pembangunan_PLTU_batang_bagi_kemajuan_perekonomian_masyarakat_serta_pada_kerusakan_lingkungan)
- Pulzl, Helga, & Treib, O. (2007). *Implementing Public Policy. dalam Handbook of Public
Analysis: Theory, Politics and Methods*. CRC Press.
- Revuelta, M. B. (2018). *Mineral Resources from Exploration to Sustainability Assesment*.
Springer US.
- Saefullah, D. (2007). *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik (Perspektif Manajemen
Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi)*. LP3AN.
- Safrina, D. (2003). *Studi Formulasi Kebijakan*.

- Sesa, B. (2018). Implementasi AMDAL Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). *Jurnal Sosio Sains*, 4(April), 1–13.
- Shahid, S., Abdelfattah, Mahmoud, A., Taha, & Faisal, K. (2013). *Developments in Soil Salinity Assessment, Modeling, Mapping, and Monitoring from Regional to Submicroscopic Scales*. Springer US. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5684-7_1
- Silvestre, B. S., & T, D. M. (2019). Innovations for sustainable development : Moving toward a sustainable future b. 208. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.244>.
- Siregar, M. A., & Utomo, S. W. (2019). Environmental impact assessment as a regulation and equator principles as an initiative. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 399(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/399/1/012081>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Research & Design*. Alfabeta.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 119–137. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>
- Sunarko, S. (2000). *Public Policy*. Airlangga University Press.
- Teng, F., & Xu, S. Q. (2012). Definition of business as usual and its impacts on assessment of mitigation efforts. *Advances in Climate Change Research*, 3(4), 212–219. <https://doi.org/10.3724/SP.J.1248.2012.00212>
- Wahab, S. A. (2007). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Wei, Y., Huang, C., Lam, P. T. I., Sha, Y., & Feng, Y. (2015). Using urban-carrying capacity as a benchmark for sustainable urban development: An empirical study of Beijing. *Sustainability (Switzerland)*, 7(3), 3244–3268. <https://doi.org/10.3390/su7033244>
- Winardi, J. (2001). *Motivasi Dan Pemotivasian Dalam Manajemen*. Rajawali Press.
- Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo.
- Yudiantono, Y., Windarta, J., & Adiarso, A. (2023). Sustainable Long-Term Energy Supply and Demand: The Gradual Transition to a New and Renewable Energy System in Indonesia by 2050. *International Journal of Renewable Energy Development*, 12(2), 419–429. <https://doi.org/10.14710/ijred.2023.5036>